

## **Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Ramah Anak di Badran Kota Yogyakarta**

---

Fahmi Rafika Perdana  
*Universitas Widya Mataram*  
Email: [rafikagunawan354@gmail.com](mailto:rafikagunawan354@gmail.com)

---

### Abstract

Social participation is a model of the community empowerment process. This is one of a direct program which is an impact on well-being improvement. This analysis was supported to explain community development basics of participation through Kampung Ramah Anak program in Badran Village of Yogyakarta City. Qualitative methods with collecting data of observation, in-depth interviews, and documentation are using as an interpretation of data. This study is seeking the program management it which isn't optimality. This criterion has been founded by program continuing with early childhood education programs activity, Posyandu, and Bank Sampah. The activities have anomaly because it still depends to fund of government charity. After that can be analysis, an anomaly has been influencing society awareness lowly to follow the activities by participative. Besides, society has still had potential to grow up participation optimality, i.e. the potentiality is supporting by any group, community, and social institution. Otherwise, the society has had though, carrying attitude, and spirit part of citizenship to empowerment program. For the optimality of Badran society spirit is needs of the government to involving academics and non-government organizations. It is very important to building of development step and accompaniment that as a spirit of simultaneous. Furthermore, the people also creation of program innovation without big budgeting but right on target and useful.

Keywords: empowerment; social participation; kampung ramah anak.

### Abstrak

Partisipasi masyarakat masih menjadi model pelaksanaan pemberdayaan, terutama program yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Analisis inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji pelaksanaan pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat melalui program "Kampung Ramah Anak" di Badran Rukun Warga II Kota Yogyakarta. Metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan sebagai bahan analisa. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan program



tersebut berjalan kurang maksimal. Kriteria ini dibuktikan dengan berjalannya program inti seperti kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Posyandu, dan Bank Sampah. Namun kegiatan inti tersebut mengalami *anomali* karena masih bergantung pada bantuan dana pemerintah. Setelah dianalisis, *anomali* disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan secara partisipatif. Meskipun demikian, masyarakat masih memiliki potensi untuk lebih optimal dalam berpartisipasi, yaitu didukung oleh banyaknya kelompok, komunitas, dan kelembagaan masyarakat yang ada. Disamping itu, masih terdapat potensi pemikiran, sikap kepedulian, dan semangat sebagian masyarakat terhadap program pemberdayaan. Untuk mengoptimalkan pemberdayaan partisipatif masyarakat Badran, pemerintah perlu melibatkan peran akademisi dan swasta. Hal ini penting sebagai stimulan untuk membangun *step* pemberdayaan dan pendampingan. Selain itu, masyarakat juga hendaknya menciptakan inovasi program tanpa pendanaan besar atau *low budgeting* namun tepat sasaran dan bermanfaat.

Kata Kunci: pemberdayaan; partisipasi masyarakat; kampung ramah anak.

## Pendahuluan

Anak adalah investasi masa depan suatu bangsa. Namun problematika yang melibatkan anak masih sering terjadi di sana sini. Kondisinya ada yang cukup memperhatikan, misalnya kasus *human trafficking*—jual beli anak dibawah umur untuk dijadikan pekerja seks ataupun eksploitasi anak lainnya. Kasus ini hampir terjadi di belahan dunia termasuk di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan kasus anak Indonesia di sepanjang tahun 2017 berjumlah 3849 aduan. Suyanto mengungkapkan belakangan ini, ada kesan kuat bahwa anak yang bekerja di bawah umur, masuk kategori berbahaya. Misalnya siswa putus sekolah, anak yang dilacurkan, anak jalanan, anak pengungsi, dan lain-lain tak lagi dipahami hanya sekedar kasus yang insidental atau temporer belaka. Kondisi ini harus diakui sebagai fenomena sosial yang membutuhkan perhatian serius, baik dari pemerintah maupun masyarakat luas.<sup>1</sup>

Menanggapi fenomena anak tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, mengeluarkan kebijakan melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU. No. 35/2014 tentang

---

<sup>1</sup> Hempri Suyatno & Suparjan, *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2000).

perubahan UU. No. 23/2002. Dalam regulasi tersebut telah dicanangkan kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2009. Kota layak anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kegiatan pengintegrasian harus terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Salah satu kota yang sudah menjadi kota layak anak adalah Yogyakarta sejak tahun 2009. Di tahun 2012 berhasil menjadi kota layak anak kelompok madya. Predikat tersebut diraih melalui upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kawasan ramah anak yang dikenal sebagai kampung ramah anak (KRA). Salah satu kampung ramah anak yang sangat menarik untuk dikaji adalah Kampung Badran. Kampung ini mampu menginisiasi kebijakan KLA dan menjadi yang pertama diantara banyak kampung lain di Yogyakarta. Hal ini sebagai salah satu realisasi *pilot project* (proyek percontohan) Program Kampung Ramah Anak.

Kampung Badran, seperti studi Ika Pasca Himawati di dapat data bahwa wilayahnya mempunyai ketidakteraturan sosial (*social disorder*) yang cukup tinggi.<sup>2</sup> Hal tersebut didukung tinjauan secara geografis, sosiologis, dan historis. Wilayah RW II Kampung Badran memiliki posisi geografis yang berada di dekat bantaran Sungai Winongo dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi berimplikasi pada beberapa aspek, seperti kesehatan, tata bangunan, dan relasi sosial masyarakatnya. Apalagi kategori penghasilan masyarakat masih tergolong kelas sosial menengah ke bawah. Hal ini disebabkan langsung oleh rata-rata tingkat pendidikan yang masih rendah. Alhasil, aspek-aspek tersebut menjadikan masyarakat Kampung Badran rentan menghadapi masalah sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ika Pasca Himawati, "Konstruksi Sosial Kampung Ramah Anak (Studi Fenomenologi Atas Implementasi Program Kampung Ramah Anak di Rw II Kampung Badran Yogyakarta)" (Universitas Gajah Mada, 2013).

<sup>3</sup> Himawati.

Kampung Badran RW 11 menarik dikaji lebih lanjut. Aspek yang perlu dikaji tersebut tentang kondisi geografis, sosiologis, dan historis yang dimiliki struktur sosial masyarakat Kampung Badran. Tentu saja ini penting sebagai implementasi program tentang kampung yang ramah anak. Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan tentang pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat dalam program Kampung Ramah Anak.

Sebagaimana penjelasan Parson, pemberdayaan menekankan pada aspek orang untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan. Jika sudah terpenuhi tiga aspek tersebut harus dapat meningkatkan kapasitas individu dan mempengaruhi hidup orang lain.<sup>4</sup> Menurut Ife<sup>5</sup>, pemberdayaan adalah upaya untuk menyiapkan masyarakat agar mampu berdaya secara kekuatan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian. Kondisi semacam ini harus berimplikasi kepada peningkatan kapasitas diri masyarakat untuk menentukan masa depan mereka. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kondisi sosial yang lebih baik di dalam komunitas masyarakat.<sup>6</sup>

Pengertian di atas dapat peneliti jadikan sebagai kerangka teoritis untuk memetakan masalah sosial yang berkembang di Kampung Badaran. Secara eksplisit, Slamet memberikan gambaran yang lebih rinci tentang makna “berdaya”. Menurutnya, konteks berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, termotivasi, berkesempatan, mampu memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, dan mampu bertindak sesuai dengan situasi sosial. Makna ini juga dapat dijadikan instrument penting dalam proses pemberdayaan. Proses ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang memiliki

---

<sup>4</sup> Zarah Puspitingtyas, Oktavia Dwi Lestari, & Aryo Prakoso, “Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2016,” *Ekspektra: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 2, no. 1 (March 14, 2018), <https://doi.org/10.25139/ekt.v2i1.700>.

<sup>5</sup> Jim Ife & Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>6</sup> Oos M Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 49.

sifat adaptif dan berkesinambungan dengan program pemberdayaan. Maka dari itu, pemberdayaan yang paling esensial adalah masyarakat mampu mengoptimalkan peran sosial secara partisipatif dan bertanggungjawab.<sup>7</sup>

Selaras dengan penelitian Pranoto dan Yusuf, konsekuensi program pemberdayaan adalah masyarakat dapat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.<sup>8</sup>

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> M Slamet, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan* (Bogor: IPB Press, 2003).

<sup>8</sup> Asa Ria Pranoto and Dede Yusuf, "Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sari Aya," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, no. 1 (September 21, 2016): 39, <https://doi.org/10.22146/jsp.13094>.

<sup>9</sup> Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: Blantika, 2004).

Begitu juga pembuktian yang dilakukan oleh Hanik dan Febri, upaya pemberdayaan masyarakat sejatinya bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri—dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Selain itu, masyarakat sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka kepada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.<sup>10</sup> Chika secara jelas membuktikan bahwa bantuan *technical assistance* jelas mereka perlukan, akan tetapi bantuan tersebut harus mampu membangkitkan prakarsa masyarakat untuk membangun bukan sebaliknya justru mematikan prakarsa. Dalam hubungan ini, kita dituntut menghargai hak-hak masyarakat, yaitu *Right of Self-Determination* dan *Right for Equal Opportunity*.<sup>11</sup> Hak untuk menentukan sendiri untuk memilih apa yang terbaik bagi masyarakat, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki.<sup>12</sup>

Ide-ide segar di atas menuntut peneliti untuk merefleksikan kembali program pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat di Kampung Badran, Kota Yogyakarta. Artikel ini penting ditulis untuk membuktikan *output* pemberdayaan yang mampu menciptakan *right of self-determination* dan *right for equal opportunity*. Peneliti mengajukan pernyataan penting tentang apakah program pemberdayaan berbasis partisipasi mampu membuktikan masyarakat dapat hidup secara mandiri. Selain itu, apakah masyarakat juga mampu meningkatkan kapasitas diri sehingga dapat memaksimalkan peran secara personal agar mengambil kesempatan yang sama antara masyarakat satu dengan yang lainnya.

Artikel ditulis bukan untuk dijadikan *blue print* perubahan kebijakan. Namun mencoba kembali untuk merefleksikan program pemberdayaan

---

<sup>10</sup> Hanik Stiyarningsih and Febri Wicaksono, "Impact of Women's Empowerment on Infant Mortality in Indonesia," *Kesmas: National Public Health Journal* 11, no. 4 (May 24, 2017): 185-191, <https://doi.org/10.21109/kesmas.v11i4.1259>.

<sup>11</sup> Chika Chaerunnissa, "Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung)," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 5, no. 2 (August 3, 2015): 99-113, <https://doi.org/10.14710/POLITIKA.5.2.2014.99-113>.

<sup>12</sup> Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*.

yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Untuk itu, penelitian ini terfokus pada pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui program Kampung Ramah Anak di Kampung Badran RW II Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif<sup>13</sup> untuk dapat mengkaji pemberdayaan berbasis partisipasi pada program KRA di Kampung Bardran RW II Yogyakarta. Pengumpulan data primer dilakukan melalui proses observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan yang dipilih untuk diwawancara berasal dari berbagai unsur, yaitu dari pihak pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak), pemangku wilayah, Forum Anak MUDIBA (Mudadi-Mudi Badran), kader PKK dan warga masyarakat biasa. Sedangkan data sekunder didapat dari berbagai dokumen pendukung yang diperoleh selama penelitian. Selama dan setelah pengumpulan data, maka data diolah dengan analisa data kualitatif untuk nantinya ditarik kesimpulan dari kajian pembahasan atau analisa yang ada.

## **Pembuktian Warga Hidup Mandiri: Fakta yang Realis?**

Pada subbab ini, peneliti menjawab pertanyaan tentang apakah program pemberdayaan berbasis partisipasi mampu membuktikan masyarakat hidup secara mandiri. Dugaan sementara yang peneliti temukan dilapangan di bagi menjadi tiga bagian, antara lain: (1) dugaan programnya vakum; (2) dugaan program tidak berhasil; dan (3) Dugaan program pemberdayaan tidak didampingi.

### *Dugaan Kevakuman Program Kampung Ramah Anak*

Berdasarkan keterangan pihak Dinas PMPPA, Kampung Badran dan Sorosutan telah menjadi daerah percontohan atau *pilot project* program Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta sejak tahun 2011. Bagi warga

---

<sup>13</sup> Norman K Denzin & Yvonna S Lincoln, *Handbook of Qualitatif Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009); Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

Badran sendiri, Kampung Badran dijadikan salah satu wilayah untuk *pilot project* KRA diketahui karena populasi anak di wilayah ini cukup tinggi. Demikian juga dengan kerawanan anak untuk keluar dari zonanya tinggi, sehingga harapan dengan adanya KRA, anak-anak akan lebih merasa nyaman dan *betah* tinggal juga tumbuh berkembang di kampungnya sendiri.<sup>14</sup>

Berbagai program diakui telah dilakukan. Program-program yang terkait RW II sebagai Kampung Ramah Anak tersebut diantaranya tersaji dalam data profil wilayah RW II Badran. Selain pembentukan Forum Anak Kampung Badran PATRIOT, misalnya program studi banding Kota Layak Anak di Kota Rembang Jawa Tengah, pergelaran-pergelaran yang melibatkan anak baik bersifat seni, olah-raga, peningkatan keterampilan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dana KRA dari Pemerintah yang turun dua kali digunakan untuk pembuatan *plang* gapura yang bertuliskan “RW II Badran Kampung Ramah Anak”, pembuatan dan pemasangan papan reklame hak-hak anak; berisi 14 hak-hak anak. Selain itu, pemasangan papan nama-nama pahlawan di beberapa lokasi di RW II. Diadakan pula *outbond* untuk anak-anak usia SD kelas 5-6 hingga tingkat SLTA yang tujuannya untuk kemandirian. Anak usia PAUD juga pernah difasilitasi *outbond*.<sup>15</sup>

Selain KRA, terdapat program lain yang mendukung adanya program KRA yang berkaitan bidang anak di RW II Badran, yaitu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Posyandu anak. Tentang program Posyandu dan PAUD dan beberapa program lainnya diungkapkan juga oleh Ketua RW II Badran:

“Sejauh ini dari pihak pengurus RW dan muda mudi yang ada di Badran telah memperhatikan proses mulai dari Posyandu, PAUD, hingga ada program jam belajar masyarakat (JBM) dengan menggandeng pihak lain (mahasiswa yang sedang KKN di Badran), dimana hal ini merupakan salah satu bentuk dan upaya menuju kampung yang ramah anak.”<sup>16</sup>

Tokoh pemuda berinisial WT mengungkapkan, “KRA Badran dulu pernah mengadakan program dengan tema jurnalisme dan mendatangkan

---

<sup>14</sup> MUDIBA (Muda-Mudi Badran, Focus Group Discussion, 18 Februari 2018.

<sup>15</sup> JS, Wawancara, 16 Februari 2018.

<sup>16</sup> S, Wawancara, 7 Februari 2018.



praktisi jurnalistik untuk pelatihan penulisan artikel yang berlanjut pada pembuatan majalah”.<sup>17</sup> Sebelum ada KRA di Badran, terdapat beberapa organisasi pemuda lainnya, antara lain PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang berada di bawah BKKBN, Forum Anak yang berada dibawah Dinas KPPA (sekarang bernama Dinas PMPPA), kemudian ada juga Karang Taruna yang berada di bawah Dinas Sosial. Pada saat peneliti menanyakan apakah ada pertemuan rutin, E menjelaskan: “*Ada, kalau dulu itu minggu kedua setiap bulan.*”

Beberapa informasi di atas merupakan kondisi program KRA saat awal berdiri hingga beberapa tahun setelahnya. Namun berdasarkan keterangan lebih lanjut, kondisi bergeliatnya program tersebut cenderung tidak terlihat lagi. Informasi kurang atau tidak berjalannya program KRA saat ini sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan berikut ini. Pertama, dari seorang warga yang dahulu pernah menjadi ketua RT 47, menyatakan “*Saya sempat menanyakan kelanjutannya Kampung Ramah Anak itu gimana, karena mungkin masuk anggaran akhirnya vakum.*”<sup>18</sup>

Selanjutnya bernada sama dengan Pak H, Ketua Mudiba, WT, menjelaskan “*Kalau setahu saya vakum itu semenjak dananya habis. Jika yang saya tahu kondisi di Badran, pendanaan cuma satu kali sekitar 20 juta atau berapa saya lupa.*”<sup>19</sup> Wakil ketua Mudiba, E, mengungkapkan hal serupa, “*Kalau sekarang saya bisa bilang forum anak mati suri. Jadi kita bergerakanya lebih atas nama Mudiba dan sasarannya gak fokus ke anak tapi ke remaja. Walaupun kita tetap melibatkan anak sebagai objek kegiatan kita.*”<sup>20</sup> Kemudian dari pihak Dinas PMPPA, menyatakan “*Di Kampung Badran sendiri KRA juga mengalami kevakuman karena ketergantungan mereka dengan dana yang diberikan, sehingga ketika dana dihentikan KRA nya akan mandek (berhenti).*”<sup>21</sup>

<sup>17</sup> WT, Wawancara, 7 Februari 2019.

<sup>18</sup> H, Wawancara, 15 Maret 2018.

<sup>19</sup> WT, Wawancara, 13 Maret 2018.

<sup>20</sup> Mubida, Focus Group Discussion, 18 Februari 2018.

<sup>21</sup> Hendro Basuki, Wawancara, 1 Maret 2018.

Informasi lain datang dari seorang kader PKK, R yang memberi keterangan kondisi terkini mengenai Kampung Ramah Anak di Badran. Sebetulnya, program KRA di Badran RW 11 masih berjalan dengan lancar. Dengan kepengurusan dan berbagai programnya. Ia memberikan penjelasan sebagai berikut “Ada BKR itu tentang Ibu-ibu, remaja dan anak-anak yang nanti disitu ada beberapa pendidikan tentang pola asuh anak kemudian PIK-R, ada PAUD, Forum Anak, Posyandu, RTH (Ruang Terbuka Hijau) karena untuk penyegaran sirkulasi udara yang diperlukan putra putri kita dan lain sebagainya yang menyangkut tentang anak-anak yang ada di RW 11. Kalau kepengurusan KRA itu, untuk saat ini dipegang keRW-an yang dikepalai oleh Pak JS dan untuk beberapa pokgi-pokgi yang berkaitan dengan KRA ada juga beberapa kepengurusan juga tersendiri.”<sup>22</sup>

Dari beberapa informasi yang ada menunjukkan kondisi KRA Badran RW 11. Saat awal berdiri yang dikelola oleh pemangku wilayah dengan membentuk Forum Anak sebagai pelaksana tugas. Program KRA saat itu berjalan dengan cukup baik dengan berbagai macam kegiatan sangat aktif. Program KRA juga ditopang beberapa program lain seperti PAUD, Posyandu, dan Bank Sampah. Program Bank Sampah sendiri hingga saat penelitian berlangsung diklaim menjadi program bidang kesehatan yang menjadi fokus atau ciri khas obyek penelitian untuk kaitannya dengan program KRA. Ciri khas lainnya berupa atribut-atribut kampanye penyadaran masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, terdapat informasi baik dari warga, Forum Anak, maupun Dinas yang menaungi program KRA Kota Yogyakarta. KRA Kampung Badran cenderung tidak berjalan bahkan mengalami kevakuman. Meskipun masih ada yang beranggapan masih berjalan lancar.

---

<sup>22</sup> R (Kader PKK) Wawancara, 23 April 2018.

## *Sudahkah Program Berhasil?*

Kampung Badran terletak di tengah Kota Yogyakarta yang dekat dengan pusat perdagangan. Mayoritas penduduknya berpendidikan rendah dan banyak warga pendatang. Kampung Badran juga berada dipinggiran Sungai Winongo, salah satu sungai besar di Kota Yogyakarta.

Jika hendak memasuki lokasi penelitian, kita akan melewati gerbang berupa gapura. Di atas gapura terdapat tulisan besar “RW XI BADRAN, SELAMAT DATANG, BADRAN RW. II MENUJU KAMPUNG RAMAH ANAK”. Setelah memasuki kampung, terdapat rumah-rumah warga yang cukup padat baik yang berjarak maupun berhimpitan. Rumah-rumah sebelum jalanan menurun atau sering disebut RT atas, dipenuhi dengan mayoritas rumah cukup layak huni. Ada beberapa cukup besar bahkan bergarasi mobil di dalamnya. Sedangkan untuk lokasi yang mendekati sekitaran sungai, berjejalan rumah-rumah dengan ukuran relatif lebih kecil dan sebagian terkesan kumuh.

Terdapat hiasan-hiasan yang bisa menarik mata bagi para pejalan yang melintasi wilayah ini seperti papan-papan pemberitahuan yang bertuliskan tentang Wajib Belajar 12 Tahun, Jagalah Kebersihan, Jam Belajar Masyarakat, Hak-Hak Anak, Kawasan Bebas Rokok, PAUD, Bank Sampah, Larangan Membuang Sampah di Kali (Sungai). Kita juga akan dihadapkan pada tiang dengan papan yang bertuliskan nama-nama Pahlawan Nasional. Di lokasi ini terdapat patung yang terdiri dari lima anak dan saling merangkul serta papan pengumuman yang digunakan oleh warga jika ada pemberitahuan yang terkait dengan kegiatan yang melibatkan warganya.

Dalam pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak, pelaksanaannya tidak lepas dari hak dasar pada anak yang menjadi lokus penting dalam pemenuhan hak anak. Lokus tersebut lahir melalui Konvensi Hak Anak yang kemudian dijabarkan ke dalam kluster yang memuat: kepentingan terbaik bagi anak, sikap non diskriminasi, hak kelangsungan hidup, hak untuk hidup bagi anak, dan penghargaan kepada hak anak. Dari kluster

tersebut lantas memuat indikator yang menjadi tolak ukur dalam melihat tindakan warga RW 11 Kampung Badran dalam memenuhi Hak Anak melalui Program Kampung Ramah Anak. Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan gugus tugas kota layak anak melakukan kontrol sosial dari masing-masing indikator yang ada dalam memenuhi hak anak. Hak anak yang dimaksud merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah kepada anak.

Dengan demikian, anak akan terhindar dari diskriminasi, memiliki perlindungan khusus, serta dapat berpartisipasi dalam kegiatan. Hal ini penting guna tercapainya pemenuhan hak anak secara mendasar. Keberadaan Hak Anak merupakan salah satu upaya yang terintegrasi untuk mewujudkan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di seluruh wilayah di Indonesia. Hak anak tersebut berpijak pada 5 kluster yang telah ditetapkan pemerintah serta dijabarkan ke dalam 5 indikator hak anak. Kluster tersebut adalah (1) Hak Sipil dan Kebebasan; (2) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Hak mendapatkan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Hak memperoleh Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya; dan (5) Hak Mendapatkan Perlindungan Khusus. Kampung ramah anak adalah langkah awal yang dilakukan Pemerintah Kota setempat untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pengintegrasian komitmen harus terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Setiap kota di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kota layak anak dengan syarat telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator kota layak anak. Indikator kota layak anak tersebut meliputi indikator yang telah diutarakan di atas. Namun yang harus menjadi perhatian lebih adalah penguatan kelembagaan dan Kluster hak anak.

Penguatan kelembagaan diantaranya meliputi adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak dan persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak. Kemudian jumlah peraturan, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan di kampung ramah anak. Selanjutnya tersedianya SDM terlatih Kluster Hak Anak dan mampu menerapkan hak anak dalam program, kebijakan, dan kegiatan. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan.

Selain program KRA, perlu juga diketahui kondisi hak-hak anak di Kampung Badran RW II sebagai bagian dari kluster Hak Anak. Hal ini merupakan indikator penilaian program KRA. Dari berbagai informasi yang didapatkan mengenai kondisi hak anak berdasarkan kluster hak anak sebagai indikator KRA di Kampung Badran RW II, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Lima Kluster Hak Anak sebagai Indikator KRA

No.	Lima Kluster Hak Anak	Kondisi Hak terkait Program KRA
1.	Hak Sipil dan Kebebasan	Untuk hak sipil belum sepenuhnya diperhatikan, ada sinyalemen belum terpenuhi kaitan KIA dan akte kelahiran anak. Untuk hak kebebasan cenderung diperhatikan dengan adanya forum anak.
2	Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Terperhatikan dengan adanya program PIK-R namun akhirnya program vakum.
3	Hak mendapatkan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Cenderung diperhatikan oleh program terkait program KRA yaitu Bank Sampah, B2W (Banyu Bening Winongo).
4	Hak memperoleh Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	Belum sepenuhnya diperhatikan, untuk hak pendidikan masih ada anak yang putus sekolah dan tidak sekolah di usia sekolah.
5	Hak Mendapatkan Perlindungan Khusus	Belum sepenuhnya diperhatikan, masih terdapat beberapa kasus kekerasan pada anak.

Sumber: Olah data hasil wawancara, Mei 2018.

Dari kluster dan indikator Kampung Ramah Anak (KRA), tabel di atas sudah menjelaskan bahwa lima kluster sudah memenuhi indikator yang disusun. Kondisi semacam ini merupakan bagian integrasi pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai jenjang usianya. Mereka harus hidup dilingkungan yang dapat menciptakan kreativitas dan terpenuhinya perlindungan sosial. Tidak boleh ada diskriminasi ataupun bentuk eksploitasi dalam bentuk apapun. Dengan begitu, penelitian ini tentu untuk mendukung keberhasilan KRA yang disesuaikan dengan konvensi internasional tentang pemenuhan Hak-Hak Anak. Namun belum sepenuhnya berjalan maksimal ketika program tersebut dijalankan pada kehidupan masyarakat.

### *Program Pemberdayaan Non-Influencer*

Menurut Parson, pemberdayaan menekankan bahwa orang harus memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain agar lebih perhatian tentang kondisi lingkungannya.<sup>23</sup> Selanjutnya, menurut Ife, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.<sup>24</sup>

Pengertian pemberdayaan tersebut membawa kita kepada realitas yang terjadi di Kampung Badran. Sebagaimana informan S mengatakan, “Kampung Badran merupakan rintisan Kampung Ramah Anak (KRA) di Jogja”.<sup>25</sup> Namun Pemerintah kurang memberikan penjelasan tentang seperti apa dan bagaimana maksud dari Kampung Ramah Anak. Tidak mudah untuk menjadikan sebuah kampung yang benar-benar ramah terhadap anak.

---

<sup>23</sup> P. A. Parsons, *Habitats, Stress, and Evolutionary Rates* (Basel: Verlag, 1994), <https://doi.org/10.1046/j.1420-9101.1994.7030387.x>.

<sup>24</sup> Ife & Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*; Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, hal. 49.

<sup>25</sup> S, Wawancara, 7 Februari 2018.

Sejauh ini, pihak pengurus RW dan muda-mudi yang ada di Badran telah memperhatikan proses mulai dari Posyandu, PAUD, hingga ada program jam masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk dan upaya menuju kampung yang ramah anak. Sementara itu, Kampung Ramah Anak bukan hanya sebuah kondisi lingkungan butuh perhatian, namun *real action* apa yang butuh dikerjakan untuk memberikan manfaat sangat tinggi terhadap anak. Kegiatan Posyandu harus dimulai dengan memperhatikan gizi buruk dan tumbuh kembang anak. Namun disisi lain, mereka juga memperhatikan para orang tua dengan memberikan penyuluhan. Tidak hanya cukup itu saja. Para remaja juga harus berkegiatan, apa saja yang perlu dikerjakan sehingga dapat berlanjut pada tahap kontroling sebuah program PAUD dan jam belajar masyarakat.

Dengan begitu, program pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat di Kampung Badran RW II, dapat berjalan namun kurang ada kejelasan dari pihak Pemerintah. Kondisi ini membuat pengurus KRA berupaya sendiri menterjemahkan maksud dari program tersebut. Penanggung jawab program langsung diketuai oleh Ketua RW dan dibantu oleh tokoh KRA dengan melibatkan muda-mudi setempat. Pelibatan Muda-Mudi agar proses kegiatan dapat dikontrol sehingga program dan kegiatan yang berkaitan dengan KRA, seperti program Posyandu dan PAUD, dapat berjalan maksimal. Selain Muda-Mudi, warga juga harus berswadaya sehingga dapat menjalankan program KRA. Swadaya yang sudah berjalan dilaksanakannya sebuah program dengan tema kesehatan seperti Bank Sampah. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri) dan B2W (Banyu Bening Winongo) sebagai bentuk peningkatkan kapasitas pemanfaatan sumber mata air.

Banyak unsur yang terlibat dalam program KRA tersebut. Implikasi dari keterlibatan banyak unsur berbuah hasil dengan pembentukan Forum Anak. Forum ini dilaksanakan dengan melibatkan peran warga dan orang tua yang mempunyai anak usia dini. Pelaksanaannya diupayakan melalui rapat rutin. Sedari awal, intervensi pemerintah dan stakeholders terkait mampu

memproses berjalannya program KRA. Namun berbagai persoalan mulai muncul sehingga menjadi kendala program tersebut. Hasilnya, program KRA mengalami kevakuman organisasi. Akibatnya berdampak pada kevakuman program. Banyak informan menyebutkan, masalah dana yang menjadi titik krusial sehingga program tidak lagi berjalan.

“Saya kurang tahu, dulu program itu sudah sejauh mana. Maksudnya pembekalan terhadap masyarakat untuk program ini sejauh mana. Jadi saya belum bisa menganalisis lebih lanjut. Misalkan dulu diajari carane gawe kegiatan itu ngene, mau rencanain kegiatan seperti ini, cari dana seperti ini, saya tidak tahu apakah sampai sejauh itu atau tidak. Kalau sampai sejauh itu seharusnya bisa berjalan sampai sekarang. Hemat saya mungkin tidak diajari yang seperti itu. Mungkin penyuluhan dari pusatnya lebih kepada penekanan pada hak-hak anak saja. Untuk evaluasi, saya belum pernah dapat undangan evaluasi KRA maupun membahas programnya.”<sup>26</sup>

Pada kesempatan yang lain, warga masyarakat juga pernah menjadi Ketua RT di lokasi penelitian memberi penilaian tidak baik atas program KRA tersebut. Sebagian warga memberikan komentar yang menohok, yakni belum jelasnya program sehingga cenderung hanya simbol-simbol saja. Program belum mampu menyentuh masalah inti di masyarakat dan persoalan anak itu sendiri. Begini pendapat warga tersebut.

“Konsep program itu belum sampai menyentuh ke masyarakat, baru sebatas logo-logo nek jenengan memutar itu kan banyak logo-logo tapi belum sampai, baru sebatas logo dan sebagai simbol apa bener-bener sosialisasi kemasyarakat. Karena anggaran 20 juta itu bagi RW II itu besar, tapi mungkin cara mem-planning anggarannya kurang pas atau belum sampai ke titik permasalahannya.”<sup>27</sup>

Di kesempatan yang sama, Dinas PMPPA menyatakan bahwa kondisi KRA di Jogja saat ini *mindset*-nya masih menyoal masalah dana. *Mindset* ini tidak bisa keluar dari pandangan masyarakat yang hanya mengandalkan bantuan secara langsung. Memang awalnya, pemerintah memberikan dana bantuan untuk membantu masyarakat. Namun tujuan akhir dari program yang dijalankan agar masyarakat bisa mandiri untuk mengolah KRA

---

<sup>26</sup> WT, Wawancara, 17 Februari 2018.

<sup>27</sup> H, Wawancara, 15 Maret 2018.



dikampungnya masing-masing. Hal ini berubah ketika cara pandang yang berbeda sehingga program tidak berjalan maksimal jika dana hibah tersebut tidak diberikan kembali kepada masyarakat.

Analisa tersebut berlanjut ketika peneliti mendapat informasi dari informan terakhir. Pemberdayaan masyarakat dalam program KRA disinyalir belum optimal karena tampak belum melibatkan sepenuhnya masyarakat. Bahkan cenderung tidak melibatkan Forum Anak sebagai pelaku lapangan sekaligus obyek program KRA dalam perencanaan, pembuatan anggaran, dan kegiatannya. Dugaan vakumnya program KRA memperkuat peneliti untuk menafsirkan data-data lapangan. Ini artinya, masyarakat masih ketergantungan dengan dana yang sudah diberikan.

Pada aspek lain, indikasi kurang optimalnya program di atas menunjukkan muara akhir pemberdayaan masyarakat belum tercapai. Pasalnya, tampak jelas masyarakat masih belum mempunyai kemampuan untuk mempertahankan keberlangsungan Program. Padahal, tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat sebagaimana ditegaskan oleh Jamasy, adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, dan melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.<sup>28</sup>

Masih menurut Jamasy, upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri. Artinya, masyarakat memiliki potensi untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Selain itu, masyarakat sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka kepada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.<sup>29</sup> Bantuan *technical assistance*

<sup>28</sup> Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*.

<sup>29</sup> Jamasy. hal. 67.

jelas mereka perlukan, akan tetapi bantuan tersebut harus mampu membangkitkan prakarsa masyarakat untuk membangun bukan sebaliknya mematikan prakarsa. Namun menjadi catatan bahwa diduga belum ada pembinaan atau pemberdayaan yang seperti harapan dari Pemerintah dan pemangku wilayah sehingga kondisi program KRA Badran RW 11 belum optimal. Bantuan yang pemerintah berikan disinyalir tidak menumbuhkan prakarsa masyarakat. Pada akhirnya, fakta program KRA di Badran RW 11 menjadi vakum.

## **Berpartisipasi dalam Program: Mampukah Meningkatkan Kapasitas Diri?**

Pada sub bagian ini peneliti hendak menjawab masalah tentang peningkatan kapasitas diri yang berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk membangun kesadaran atas peranannya di masyarakat. Namun berpartisipasi secara sosial dengan kesadaran membangun komunitas sendiri, apakah menjadi solusi atas masalah program yang sudah disebutkan di atas? Berikut beberapa persoalan yang peneliti temukan dilapangan selama penelitian.

### *Partisipasi Semu dan Implikasinya Pada Program*

Pemberdayaan berbasis partisipasi sosial, yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan sehingga menikmati hasilnya. Kegiatan ini dapat berlangsung jika ada upaya alih fungsi dari semula obyek menjadi subyek (pelaku) aktif dalam pembangunan. Terminologi ini kerap disamakan sebagai proses pembangunan *botton up*.<sup>30</sup> Namun sedari awal, peran pembangunan yang bersifat *botton up* harus didorong oleh partisipasi aktif dari masyarakat. Sebagian besar pakar mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok untuk

---

<sup>30</sup> Ahmad Izudin, *Gerakan Sosial Petani Strategi, Pola, dan Tantangan di Tengah Modernitas* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), hal. 139-151.

ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>31</sup> Mubyarto, secara lebih bijak mengartikannya sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan diri sendiri.<sup>32</sup>

Jadi, inti terminologi partisipasi adalah sikap sukarela untuk membantu keberhasilan program pembangunan. Hal penting dari partisipasi, yaitu masyarakat tidak sekedar hanya aspek fisik semata, karena esensinya ada pada inisiatif—sumbang saran sebagai salah satu wujud partisipatif. Namun demikian, kehadiran seseorang secara fisik dalam kegiatan publik memiliki nilai penting dari sekedar pengetahuannya tentang kegiatan itu. Begitu pula kehadiran tidak akan cukup ketika tidak didukung oleh keaktifan dalam mengartikulasikan kepentingan dan suaranya dalam sebuah kegiatan. Akhirnya, keaktifan juga perlu dilengkapi dengan peran dan sumbangan dalam sebuah kegiatan sebagai wujud konkrit dari keterlibatan. Selain itu, partisipasi menghendaki keberpihakan pada basis di level *grassroots*, pengakuan lokal, dan mengutamakan proses belajar.<sup>33</sup>

Partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela. Keterlibatan tersebut boleh karena alasan-alasan secara intrinsik maupun ekstrinsik dari keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup empat tahap pembangunan. Empat tahap tersebut adalah pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.<sup>34</sup> Hal ini dapat diidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat melalui beberapa jenis, antara lain: (1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat; (2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok; (3) Melibatkan diri pada

---

<sup>31</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 71-80.

<sup>32</sup> Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1998), hal. 67.

<sup>33</sup> Mubyarto & Kartodirjo Sartono, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 36.

<sup>34</sup> Aprilia Theresia et al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015).

kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain; (4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat; (5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; dan (6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.<sup>35</sup>

Dengan beberapa bentuk tersebut, peneliti melihat bentuk partisipasi masyarakat Badran terlihat pada awal perintisan program KRA. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan Ketua RW II; saat itu anak-anak yang terwadahi dalam Forum Anak menterjemahkan sendiri atau mengartikan program KRA dengan ide dan gagasan yang timbul dari Forum tersebut. Ide dan gagasan tersebut berupa kegiatan-kegiatan berkaitan dengan anak seperti kegiatan *Kumpul Bocah* yang berjejaring dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan sebagainya.

Pada waktu terakhir ini, setelah MUDIBA tidak mendapatkan asupan dana dari pemerintah maka mereka mencari dana dengan menyebarkan proposal ke kantor-kantor instansi pemerintah. Dana yang diperoleh pun dirasa lumayan untuk menyokong berjalannya kegiatan. Tak hanya itu, mereka pun pernah membuat acara mandiri tanpa menggunakan dana dan menyebar proposal, yaitu *Seniningan* (Pentas Seni dan Diskusi Ringan). Kegiatannya berupa penyuluhan dengan mendatangkan narasumber dari kota yang ahli dibidang anak. Namun sebelum diskusi berlangsung, diadakan pentas seni kecil-kecilan untuk menarik masyarakat sekitar. Setelah warga datang, barulah diskusi dimulai. Lebih lanjut dari MUDIBA menyaksikan masyarakat Badran belum sesuai dengan harapan mereka seperti yang diungkapkan E (Wakil Ketua MUDIBA) dalam FGD berikut:

“Belum menurut saya, masyarakat di sini belum sesuai dengan harapan saya secara pribadi. Keikutsertaan dalam pendanaan kurang menurut saya. Dukungan moril, beberapa kurang beberapa baik, 60:40 lah karena lebih sering mendapatkan yang mendukung sedangkan kalau pendanaan fifty-fifty.”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Theresia et al., hal. 81.

<sup>36</sup> MUBIDA, Focus Group Discussion (FGD), 18 Februari 2018.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam KRA dari berbagai informasi di atas, berdasarkan pendapat Mubyarto yang secara bijak mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan diri sendiri.<sup>37</sup> Selain itu, partisipasi menghendaki keberpihakan pada basis di level grassroots. Pengakuan lokal dan mengutamakan proses belajar adalah esensi penting dalam proses partisipasi.<sup>38</sup> Dengan demikian, program-program KRA yang ada baru sampai pada tataran pengurus dan kader-kader yang menjalankan program. Namun belum sampai pada masyarakat bawah atau grass roots sehingga dapat dikatakan belum merata tepat mengenai sasaran, kurang ada pengakuan lokal yang menyeluruh, dan kurang mengutamakan proses belajar. Kaitan mengutamakan proses belajar karena pada saat penelitian, kegiatan dari program KRA cenderung vakum. Indikasinya, pengurus KRA kurang mendapatkan pengetahuan dalam mengelola organisasi secara berkesinambungan dan kurang ada proses belajar untuk pengelolaan program yang berkelanjutan. Sedangkan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi berdasarkan rumusan Theresia (et.al) maka berbagai bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Badran RW 11 dalam program KRA terlihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat dalam Program KRA

No.	Bentuk Partisipasi	Kegiatan atau Keterlibatan Masyarakat
1.	Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat	Sebagian anggota masyarakat sudah menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat seperti menjadi anggota Forum Anak sekaligus Pengurus KRA, menjadi Kader PKK, Pengurus PAUD dan Posyandu, dan beberapa program lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak

<sup>37</sup> Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, hal. 68.

<sup>38</sup> Mubyarto & Sartono, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, hal. 36.

---

2.	Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.	Dari yang sudah terlibat dalam kelompok-kelompok masyarakat tersebut melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok berupa rapat-rapat dan pertemuan lainnya.
3.	Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain.	Sebagian pengurus wilayah dan KRA melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain. Misalnya, menghimpun dana untuk kegiatan dan mengundang serta melibatkan warga masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Meskipun dinilai dukungan masyarakat yang ada masih kurang maksimal.
4.	Menggerakkan sumberdaya masyarakat.	Dalam program KRA sudah menggerakkan sumberdaya masyarakat yang ada, namun baru terutama pada pemuda dan para kader ibu-ibu yang termasuk dalam program lain—yang bernuansa bidang anak dan keluarga. Sedangkan untuk masyarakat lainnya belum benar-benar digerakkan.
5.	Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.	Dalam aspek mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, terdapat indikasi bahwa belum optimal karena meski ada <i>klaim</i> bahwa warga, dalam hal ini pemuda, pengurus KRA dibebaskan untuk menentukan dan melaksanakan berbagai kegiatan dengan pengurus wilayah hanya sebagai pendamping, akan tetapi di sisi lain terdapat informasi sebaliknya.
6.	Memfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.	Sebagian masyarakat merasakan memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan KRA namun sebagian masyarakat lainnya belum merasakan. Bahkan cenderung mempertanyakan tentang hasilnya karena masih terdapat beberapa hak anak yang terlanggar. Selain itu juga hasil-hasil kegiatan yang pernah ada disinyalir kurang dirasakan hasilnya dan belum memahaminya masyarakat atas program-program yang ada.

---

Sumber: Hasil wawancara diolah, Mei 2018.

Dari berbagai bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Badran RW II pada program KRA, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat sudah ada, namun belum optimal. Belum optimalnya partisipasi terutama dengan catatan, karena hanya sebagian warga saja yang berpartisipasi dan digerakkan untuk ikut serta dalam berbagai program. Kondisi dari bentuk partisipasi demikian linear dengan informasi belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak yang ada.

### *Kendala-Kendala Program dan Pembinaan yang Nyaris Tidak Ada*

Terdapat aspek pendukung atau potensi dan beberapa kendala yang dimiliki warga masyarakat Badran RW II yang kaitannya dengan program KRA. Aspek pendukung yang ada pada masyarakat dan sangat menonjol berupa potensi banyaknya kelompok, komunitas, dan kelembagaan atau organisasi kemasyarakatan. Berbagai kelompok dan kelembagaan tersebut berasal dari rintisan warga (swadaya) maupun rintisan program Pemerintah atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang masuk pada Kampung Badran. Dengan banyaknya kelompok dan kelembagaan masyarakat yang ada, membuat masyarakat banyak memiliki pilihan serta peluang untuk berpartisipasi dalam program KRA. Namun di sisi lain, banyaknya kelompok dan kelembagaan yang hadir di lokasi penelitian, sekaligus menjadi kendala sebagian warga masyarakat yang sudah sangat aktif di dalamnya.

Sebagian warga dari pengamatan peneliti, sebenarnya memiliki semangat dan kepedulian terhadap keberlangsungan program KRA. Hal tersebut ditunjukkan berbagai warga yang menjadi informan dengan sikap yang tidak *acuh tak acuh* tapi masih memberikan kritik membangun agar program KRA tetap ada dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sebenarnya merupakan potensi dari segi pemikiran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program KRA.

Bagi masyarakat yang sudah tergolong aktif berpartisipasi di berbagai kelompok dan kelembagaan yang ada, namun menjadi kendala dan tidak dapat

fokus pada kelompok atau kelembagaan tersebut. Berbagai program yang tumpang tindih disinyalir juga menjadi permasalahan anggota masyarakat berpartisipasi dalam program KRA karena dari segi waktu sangat terbatas. Hal tersebut sebagaimana yang diutarakan informan R, bahwa masalah masyarakat untuk ikut andil dalam berbagai program adalah kendala waktu.

Selain waktu, juga dari segi kontur geografis yang mencolok antara RT di atas dan RT bawah yang dekat bantaran sungai. Disampaikan dalam kesempatan FGD dengan MUDIBA, bahwa kehadiran masyarakat pada program-program yang diadakan seringkali kurang optimal. Jika diadakan di RT atas maka warga dari RT bawah kurang menghadiri. Demikian juga sebaliknya, jika program diadakan di RT bawah dari RT atas kurang kehadirannya. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat belum maksimal karena kendala geografis wilayah RT-RT yang ada. Selain itu, masalah kesadaran dan *mindset* masyarakat. Masih dalam kesempatan FGD dengan MUDIBA yang di dalamnya terdapat beberapa pendapat bahwa warga yang ada kurang memberikan dukungan terhadap apa yang pernah dilakukan untuk program KRA.

Selanjutnya, persoalan pola pikir masyarakat yang lebih mengandalkan pendanaan dari pihak luar menjadi penghambat masyarakat untuk lebih optimal berpartisipasi karena program menjadi terhenti dan seolah dengan tanpa dana tidak bisa menjalankan program. Jadi, melihat kondisi keterlibatan masyarakat yang demikian, mengindikasikan ketergantungan dari pihak luar masih tinggi. Hal tersebut mencerminkan partisipasi belum optimal.

Pada aspek lain, aspek *lost generation* dan masih kurangnya pembinaan dari pihak Pemerintah. Mengenai aspek *lost generation*, diinformasikan pada saat FGD MUDIBA dan diduga oleh pihak Dinas PMPPA. Terakhir, kendala pembinaan oleh pemerintah yang dirasa kurang. Pembinaan yang dimaksud, dalam artian pembinaan melakukan partisipasi yang terarah sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar dalam proses partisipasi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga belum maksimal memberikan pembinaan dalam membangun pengertian atau maksud yang jelas kepada seluruh masyarakat tentang



Kampung Ramah Anak. Informan S menyatakan, Kampung Badran merupakan rintisan Kampung Ramah Anak (KRA) di Jogja. Namun pemerintah sendiri tidak memberikan kejelasan tentang seperti apa dan bagaimana maksud dari Kampung Ramah Anak. Ketika masyarakat memahami maksud, tujuan, dan manfaat dari program KRA, maka akan berpengaruh positif pada partisipasi masyarakat.

## Penutup

Implementasi program KRA ditopang oleh beberapa program seperti PAUD, Posyandu, dan Bank Sampah. Program Bank Sampah sendiri dapat diklaim sebagai di bidang kesehatan. Sementara itu, ciri khas lain berupa atribut-atribut kampanye penyadaran masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak. Seiring berjalan waktu, Program KRA Kampung Badran cenderung tidak berjalan bahkan mengalami kevakuman sejak bantuan dana dari pemerintah terhenti.

Berkaitan dengan kondisi hak-hak anak, ada yang sudah dalam kondisi terpantau baik dengan adanya program KRA. Hak-hak anak tersebut terutama hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan, hak kebebasan, hak memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya. Sedangkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kesadaran anak mengenai usia perkawinan dan kesehatan reproduksi. Pada kasus ini, peneliti cenderung mendapati program yang terakomodir dan pernah ada. Namun saat penelitian berlangsung mengalami kevakuman. Kemudian hak mendapatkan perlindungan khusus dan hak mendapat pendidikan, juga hak sipil menjadi catatan karena disinyalir masih belum diperhatikan dari program-program yang ada sehingga terdapat beberapa kasus belum terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Program-program KRA yang ada disinyalir baru sampai pada tataran atas, yaitu kader-kader yang menjalankan program dan belum sampai pada

tataran masyarakat bawah atau *grassroots* sehingga belum merata dan tepat sasaran. Hal ini karena kurang ada pengakuan warga lokal secara menyeluruh. Indikasi kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat karena tujuan awalnya belum tercapai. Tampak pada masyarakat yang belum bisa mandiri—belum mempunyai kemampuan mempertahankan keberlangsungan program.

Dari berbagai bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Badran RW II pada program KRA, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat sudah ada. Namun belum optimal. Belum optimalnya partisipasi karena tingkat berpartisipasi dalam berbagai program tidak berjalan maksimal. Selain itu, belum optimalnya program karena belum ada tahap pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan). Hal ini berdampak pada fakta vakumnya program KRA pada kurun waktu yang cukup lama.

Dengan begitu, peran dan pembinaan dari berbagai pihak baik Pemerintah, akademisi, maupun swasta misalnya dari LSM dan dunia usaha perlu ditingkatkan. Pembinaan, seyogyanya, diberikan dengan lengkap dari berbagai tahapan pembangunan, disertai pendampingan, dan penting tetap dengan pemantauan yang berkesinambungan meskipun sudah dilepas atau dalam konteks *exit program*. Hal tersebut sangat perlu karena seringkali masyarakat belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam melakukan tahapan-tahapan tersebut untuk optimalisasi partisipasi mereka. Masyarakat hendaknya juga lebih berperan serta secara aktif pada program KRA. Dengan tidak bergantung pada bantuan dana semata, dari pihak ekstern maupun intern. Namun masyarakat supaya mampu menggagas dan menciptakan kegiatan-kegiatan kreatif tanpa pendanaan besar atau *low budgeting* namun tepat sasaran dan bermanfaat untuk tercapainya tujuan program KRA.

## Daftar Pustaka

- Anwar, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Chaerunnissa, Chika. “Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten

- Brebes (Studi Kasus Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung).” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 5, no. 2 (August 3, 2015): 99–113. <https://doi.org/10.14710/POLITIKA.5.2.2014.99-113>.
- Denzin, Norman K, and Yvonna S Lincoln. *Handbook of Qualitatif Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Himawati, Ika Pasca. “Konstruksi Sosial Kampung Ramah Anak (Studi Fenomenologi Atas Implementasi Program Kampung Ramah Anak di RW 11 Kampung Badran Yogyakarta).” Universitas Gajah Mada, 2013.
- Ife, Jim, and Frank Tesoriero. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Izudin, Ahmad. *Gerakan Sosial Petani Strategi, Pola, dan Tantangan di Tengah Modernitas*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.
- Jamasy. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Blantika, 2004.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mubyarto. *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media, 1998.
- Mubyarto, and Kartodirjo Sartono. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Parsons, P. A. *Habitats, Stress, and Evolutionary Rates*. Basel: Verlag, 1994. <https://doi.org/10.1046/j.1420-9101.1994.7030387.x>.
- Pranoto, Asa Ria, and Dede Yusuf. “Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sari Aya.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, no. 1 (September 21, 2016): 39. <https://doi.org/10.22146/jsp.13094>.
- Puspitaningtyas, Zarah, Oktavia Dwi Lestari, and Aryo Prakoso. “Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2016.” *Ekspektra: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 2, no. 1 (March 14, 2018): 89. <https://doi.org/10.25139/ekt.v2i1.700>.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Slamet, M. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press, 2003.
- Stiyaningsih, Hanik, and Febri Wicaksono. “Impact of Women’s Empowerment on Infant Mortality in Indonesia.” *Kesmas: National Public*

*Health Journal* 11, no. 4 (May 24, 2017): 185. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v11i4.1259>.

Suyatno, Hempri, and Suparjan. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.

Theresia, Aprilia, Khrisna S. Andini, Prima G. P. Nugraha, and Totok Mardikanto. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2015.